

WALIKOTA MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR 19 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur 13-328/2021);
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 41 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 2);

21. Peraturan Walikota Malang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Malang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2023 Nomor 5);
22. Peraturan Walikota Malang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2023 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Malang.
7. Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.
8. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Malang.
9. Dinas adalah Dinas Daerah Kota Malang.
10. Badan adalah Badan Daerah Kota Malang.
11. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.

12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada:

- a. RKPD Tahun 2024; dan
- b. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

## BAB III SISTEMATIKA

### Pasal 3

- (1) Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk masing-masing Perangkat Daerah tersusun berdasarkan Sistematika yang terdiri atas:
  - a. Pendahuluan;
  - b. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
  - c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
  - d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
  - e. Penutup.
- (2) Isi atau materi muatan dari sistematika dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, dengan urutan sebagai berikut:
  - a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
  - c. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - d. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

- e. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- g. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- h. Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- i. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
- j. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
- l. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- m. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- n. Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata;
- o. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah;
- p. Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
- q. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- r. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- s. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- t. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah;
- u. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- v. Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
- w. Rencana Kerja Kecamatan Klojen;
- x. Rencana Kerja Kecamatan Blimbing;
- y. Rencana Kerja Kecamatan Kedungkandang;
- z. Rencana Kerja Kecamatan Lowokwaru;
- aa. Rencana Kerja Kecamatan Sukun; dan
- bb. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB IV  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan apabila terjadi perubahan atas RKPD.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Pagu anggaran tiap-tiap usulan program/kegiatan/subkegiatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pagu indikatif tiap-tiap program/kegiatan/subkegiatan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota Malang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Malang ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 9 Agustus 2023

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 9 Agustus 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

ERIK SETYO SANTOSO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2023 NOMOR 19

Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19681112 199102 1 002



BB. RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
TAHUN 2024

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 memuat kerangka kebijakan, kegiatan, sasaran, uraian program, kegiatan, sub kegiatan, serta rencana indikatif pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang dalam mengemban visi dan misi. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Tahapan dan tata cara penyusunan Renja SKPD yaitu persiapan penyusunan Renja SKPD, penyusunan rancangan Renja SKPD, pelaksanaan forum SKPD, penetapan renja SKPD. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Malang sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Malang mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan program dan kegiatan tahunan. Perencanaan tersebut dituangkan dalam berbagai dokumen tertulis salah satunya yaitu Rencana Kerja (Renja). Dokumen tersebut ditulis dengan mengacu dan berpedoman kepada landasan peraturan perundangan yang berlaku dan dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang di Kota Malang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Kota Malang.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang ini merupakan implementasi Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang Tahun 2018-2023. Renja Tahun 2024 memuat penjabaran visi dan misi, tugas pokok dan fungsi, serta program dan kegiatan Badan Kesbangpol Kota Malang pada tahun 2024.

SP

1

Rencana Kerja ini disusun berdasarkan isu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dihadapi, pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategi, mengkaji ulang terhadap rencana kerja sebelumnya serta mempertimbangkan masukan maupun saran dari eksternal.

Untuk mewujudkan visi kota Malang yaitu Terwujudnya Kota Malang sebagai Kota Bermartabat maka penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Malang harus dijalankan sebaik-baiknya dengan prinsip *good governance* yang meliputi partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan efisiensi, efektifitas serta profesionalisme.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang ini menggambarkan tujuan, program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam kurun waktu satu tahun dan dalam penyusunannya diperlukan data atau dokumen yang meliputi: kebijakan pemerintah Pusat, Kebijakan pemerintah propinsi, kebijakan pemerintah daerah, aspirasi masyarakat, perkembangan situasi global, regional maupun daerah, kinerja masa kini serta kondisi yang diinginkan dimasa yang akan datang. Sehingga diharapkan dalam penyusunan Rencana Kerja ini akan diperoleh suatu kegiatan yang partisipasif, transparan, komprehensif dan akuntabel mengingat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang sebagai salah satu lembaga perangkat daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

SR

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023;
19. Peraturan Walikota Malang Nomor 62 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang;
20. Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Bakesbangpol

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang Tahun 2024 dimaksudkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan tahun 2024, sehingga penyelenggaraan program dan kegiatan dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel, sebagai bagian dari penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang Tahun 2024 adalah untuk terselenggaranya tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2023 dengan baik dan terkoordinasi, sesuai dengan tujuan masing-masing program dan kegiatan.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Susunan garis besar isi dokumen Penyempurnaan Renja SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang dan pokok bahasan dalam penulisan Penyempurnaan Renja SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

#### 1. BAB I : PENDAHULUAN :



Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### 1.1 Latar Belakang.

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/ kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### 1.2 Landasan Hukum.

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

#### 1.3 Maksud dan Tujuan.

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

#### 1.4 Sistematika Penulisan..

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## 2. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah

dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang

sp

tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan

4. Lampiran tabel.

#### 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Sajikan Tabel T-C.32.

### 3. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### a. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

#### b. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

#### c. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal :
  - a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah
  - b. Pencapaian SDGs

Sp  
h

- c. Pengentasan kemiskinan
  - d. Pencapaian NSPK dan SPM
  - e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah
  - f. Pengembangan daerah terisolir
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :
    - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
    - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
    - c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
  3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
4. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
    - 4.1 Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan (Tabel T-C.33)
    - 4.2 Tabel Pemetaan sesuai KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021
5. BAB V : PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

    - a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
    - b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
    - c. Rencana tindak lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra.

Pada bab ini, berisikan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang tahun 2022, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. *Review* hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

a. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA.

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran pada renstra yang direncanakan :

a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
  - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
    - 1) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
  4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
    - 1) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
  5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
    - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
    - 2) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
  6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
    - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
  7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
    - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik..
    - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
  8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
    - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
    - 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- b. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK.
1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.
    - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai

Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah.

- 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

c. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas, dan Ormas Asing di Daerah.

d. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat terealisasi sebesar 2320 surat dari target pada renstra 1000 surat.
2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan terealisasi sebesar 1980 orang dari target pada renstra 900 orang.

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan :

- a. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya.

Sp

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

Sub Kegiatan ini anggaran tercapai sebesar 93.89% dengan terealisasi sebesar 1765 orang dari target pada renstra sebesar 1815 orang.

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

a. Program Pelayanan Kesekretariatan

Dengan tercapainya target program, maka kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dapat terpenuhi.

b. Program Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Dengan tercapainya target program, maka konflik yang berpotensi disintegrasi bangsa dapat terselesaikan.

c. Program Penguatan Ideologi, wawasan kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama.

Dengan tercapainya target program, maka penurunan kejadian yang berpotensi menyebabkan disintegrasi semakin meningkat.

d. Program Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Dengan tercapainya target program, maka persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat semakin meningkat dan ormas dapat lebih berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan.

2.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan penjelasan implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, maka pada tahun 2023 perlu dilakukan adalah meningkatkan kinerja kegiatan untuk mendukung capaian program.

Berikut disajikan matrik rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023.

Tabel 2.2. (TC - 29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi Kinerja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023) s/d Triwulan 2	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>									
		<b>Persentase dokumen perencanaan, keuangan, dan pelaporan yang disusun tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>75%</b>	<b>75%</b>	<b>100%</b>	<b>275%</b>	<b>68.75%</b>
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100%		100%	100%	100%			
		Jumlah dokumen		16 dokumen						

SP

bb. II - 6

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi Kinerja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023) s/d Triwulan 2	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai kebutuhan						100%		
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen							
		Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja		15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	100%	15 dokumen		
		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	15 laporan							
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat	100%		100%	100%	100%	100%		

SP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi Kinerja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023) s/d Triwulan 2	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Daerah	waktu								
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN		28 pegawai						
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	28 orang/bulan		28 pegawai	28 pegawai	100%			
		<b>Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>80%</b>	<b>66.67%</b>	<b>83.34%</b>	<b>80%</b>	<b>247%</b>	<b>61.67%</b>
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	100%		100%	100%	100%	100%		
		Jumlah barang milik daerah yang akan dinilai		10 unit						

Sp

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi Kinerja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023) s/d Triwulan 2	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah		10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	100%			
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	10 laporan					10 laporan		
		Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD	100%		100%	100%	100%	100%		
		Jumlah peralatan yang diadakan		12 jenis						
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor		12 jenis	12 jenis	12 jenis	100%			-
		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	12 unit					12 unit		
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%		100%	100%	100%	100%		-

Sp



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi Kinerja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023) s/d Triwulan 2	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara		13 unit						
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara		13 unit	13 unit	13 unit	100%			-
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	13 unit					13 unit		
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara		19 jenis	19 jenis	19 jenis	100%			-
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	19 unit					19 unit		
		<b>Persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>

SP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi Kinerja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023) s/d Triwulan 2	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100%		0	0	0%	100%		-
		Jumlah peserta bimtek peraturan perundangan		28 orang						
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	28 orang	28 orang	0	0	0%	28 orang		-
		<b>Persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>	<b>250%</b>	<b>62.50%</b>
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	100%		100%	100%	100%			-

Sp ✓

bb. II - 11

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi Kinerja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023) s/d Triwulan 2	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah surat kabar dan jumlah buku peraturan perundang-undangan		104 eksemplar						
		Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian						100%		
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		104 eksemplar	104 eksemplar	104 eksemplar	100%			-
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	104 dokumen					104 dokumen		
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		150 OH	150 OH	150 OH	100%			-

68 1

bb. II - 12

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi Kinerja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023) s/d Triwulan 2	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	152 laporan					152 laporan		
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	100%		100%	232%	232%	100%		-
		Jumlah surat masuk dan keluar selama 1 tahun		2355 surat						
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik		2355 surat	1000 surat	2320 surat	232%			-
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1000 laporan					1000 laporan		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air, dan listrik		12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			-

Sp  
N

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi Kinerja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023) s/d Triwulan 2	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	12 laporan					12 laporan		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan		2050 m <sup>2</sup>	2050 m <sup>2</sup>	2050 m <sup>2</sup>	100%			-
	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan					1 laporan		
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	<b>Persentase peningkatan pemahaman ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa</b>	13%	12.53%	13%	28.60%	220%	13%	54%	13.53%
		Jumlah peserta		1025 orang	900 orang	1980 orang	220%	900 orang		-
		Persentase peningkatan pemahaman ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa	13%							

SP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi Kinerja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023) s/d Triwulan 2	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta pertemuan	900 orang	1025 orang	900 orang	1980 orang	220%	900 orang	-	-
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan agama	75%	68.80%	72.50%	70.50%	97.25%	75%	214%	53.58%
	Kegiatan Perumusan	Jumlah peserta		1784 orang	1815 orang	1765 orang	97.25%	1815 orang		-

SP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Program Hasil dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi Kinerja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023) s/d Triwulan 2	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan agama	75%				8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah peserta pertemuan, Jumlah peserta rakor  Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama, penghayat kepercayaan di daerah	1815 orang	1534 orang, 250 orang	1815 orang	1765 orang	97.25%	1815 orang		-

Sp  
f

bb. II - 16

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Program Hasil dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi Kinerja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023) s/d Triwulan 2	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan dan Keamanan</b>	<b>75%</b>	<b>70%</b>	<b>72.50%</b>	<b>393.92%</b>	<b>543%</b>	<b>75%</b>	<b>539%</b>	<b>134.73%</b>
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah peserta		100 orang, 200 orang	300 orang	1630 orang	543%	2272 orang		-
		Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya	75%							

Sf 12



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output) (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi Kinerja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023) s/d Triwulan 2	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3 - Jumlah personil pemantau, personil wasdin, personil FKDM, personil Tim Terpadu Konflik Sosial, personil Forkopimda - Jumlah peserta rakor, sosialisasi, pembekalan, FGD	4	5 100 orang, 200 orang	6 300 orang	7 1630 orang	8=(7/6) 543%	9	10=(5+7+9) 100 orang,	11=(10/4) -

Sp

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi Kinerja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023) s/d Triwulan 2	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah orang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	2272 Orang					2272 orang		
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat</b>	<b>60%</b>	<b>55%</b>	<b>57.50%</b>	<b>143.75%</b>	<b>250%</b>	<b>60%</b>	<b>259%</b>	<b>64.69%</b>
	Kegiatan Perumusan	Jumlah parpol penerima hibah		10 parpol	10 parpol	10 parpol	100%			-

Spr  
A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi Kinerja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023) s/d Triwulan 2	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat dan peran serta ormas dalam pembangunan  Jumlah parpol	60%					10 parpol		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang	Jumlah parpol penerima hibah		10 parpol	10 parpol	10 parpol	100%			-

Sf N

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun Berjalan	
					Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi Kinerja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023) s/d Triwulan 2	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10 orang				8=(7/6)	10 orang		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika	Jumlah pelaku sosialisasi, jumlah stakeholder yang terlibat		150 orang, 2 kali	150 orang	375 orang	375%			-

Sf A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi Kinerja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023) s/d Triwulan 2	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan, dan partai politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	300 orang					150 orang		
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>Persentase peran serta ormas dalam pembangunan</b>	<b>35%</b>	<b>30%</b>	<b>32.50%</b>	<b>102.92%</b>	<b>317%</b>	<b>35%</b>	<b>168%</b>	<b>41.98%</b>
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan	Jumlah ormas yang terdata		100 ormas	120 ormas	380 ormas	317%	120 ormas		-
		Persentase peran serta ormas	47.5%							

Sjk

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi Kinerja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023) s/d Triwulan 2	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengawasan Organisasi Masyarakat	dalam pembangunan								
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah ormas yang terdata	120 ormas	100 ormas	120 ormas	380 ormas	317%	120 orang		-
		Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah								

Sf

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok fungsi sesuai dengan urusan dimaksud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang menetapkan Indikator Kinerja Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang sebagai tolok ukur yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi. Indikator sasaran ini dirumuskan berdasarkan :

1. Analisis terhadap Indikator Kinerja dalam NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria);
2. Analisis terhadap Indikator Kinerja dalam SPM;
3. Analisis terhadap Indikator Kinerja Kunci sesuai PP Nomor 6 tahun 2008;
4. Dan mengacu pada Lampiran T-A1 Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Aspek dan Indikator Kinerja menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (dampak/impact) Pemerintah Daerah;
5. Isu strategis dalam penyelenggaraan tugas pokok fungsi;
6. Evaluasi pelaksanaan renstra/renja tahun sebelumnya.

Berdasarkan penetapan kinerja/rencana kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang memiliki 3 (tiga) indikator sasaran rencana kerja yaitu :

- a. Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa.
- b. Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat dan peran serta ormas dalam pembangunan.
- c. Nilai SAKIP.

Tabel 2.3. (TC – 30) Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang tidak memiliki SPM (Standar Pelayanan Minimal)/Standar Nasional dan IKK (Indikator Kinerja Kunci) sehingga untuk menentukan tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji menggunakan indikator pada Renstra.

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK (Indikator Kinerja Kunci)	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian					Proyeksi		Catatan Analisis	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Tahun 2023		Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa	-	-	67.50%	70.00%	72.50%	75%			57.14%	67.50%	50.43%	70.50%					
2	Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat dan peran serta ormas dalam pembangunan	-	-	37.50%	40%	42.50%	45%	80%		84.69%	40%	42.50%	57.50%					
3	Indeks Kota Toleran								6.25%									

SP



No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK (Indikator Kinerja Kunci)	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian						Proyeksi		Catatan Analisis		
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Tahun 2023	Tahun 2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
4	Persentase penyelesaian gangguan disintegrasi bangsa								75%											
5	Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih								60%											
6	Persentase peran serta ormas dalam pembangunan								35%											
7	Nilai SAKIP	-	-		80.5	82.5	83.5	84.9	85.0	77.49	83.92	83.92	85							

*Handwritten signature and initials*

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah :

- a. Kecenderungan melemahnya komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai sejarah kebangsaan dan bela negara.
- b. Peningkatan ketentraman dan ketertiban sehingga dapat mewujudkan suasana lingkungan yang terbebas dari berbagai gangguan keamanan, konflik antar golongan, dan kerusuhan yg bermotif Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) di masyarakat.
- c. Belum maksimalnya peran serta masyarakat dalam pembangunan kehidupan politik dan organisasi kemasyarakatan, serta dalam peningkatan implementasi Hak Asasi Manusia (HAM).

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan dari Pemerintah Kota dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sehingga akan menghasilkan program-program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan kota.

Berikut adalah tabel review rancangan Renja Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang.

Sp

Tabel 2.4. (TC - 31 ) Review Terhadap Rancangan Akhir Tahun 2024

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				80,904,716,740				80,904,716,740		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6,930,348,833	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6,930,348,833		
			Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%			Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%			
	Kegiatan Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai kebutuhan	100%	143,256,300	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai kebutuhan	100%	143,256,300		
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	44,661,100	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	44,661,100		

Sf

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	15 laporan	98,595,200	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	15 laporan	98,595,200		
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100%	4,658,757,300	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100%	4,658,757,300		
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	28 orang/bulan	4,658,757,300	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 orang/bulan	4,658,757,300		
			<b>Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik</b>	<b>80%</b>			<b>Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik</b>	<b>80%</b>			
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	100%	4,862,029	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	100%	4,862,029		
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	10 laporan	4,862,029	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	10 laporan	4,862,029		

No.	Rancangan Akhir RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD	100%	172,112,922	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD	100%	172,112,922			
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	12 unit	172,112,922	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	12 unit	172,112,922			
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	429,606,550	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	429,606,550			
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	13 unit	379,456,550	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	13 unit	379,456,550			
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	19 unit	50,150,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	19 unit	50,150,000			

88

10

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
			<b>Persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu</b>	<b>100%</b>			<b>Persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu</b>	<b>100%</b>			
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	-	-	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	-	-		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	-		
			<b>Persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</b>	<b>100%</b>			<b>Persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</b>	<b>100%</b>			
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	100%	886,698,204	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	100%	886,698,204		
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	104 dokumen	37,400,000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	104 dokumen	37,400,000		

Sp

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	152 laporan	849,298,204	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	152 laporan	849,298,204		
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	100%	635,055,528	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	100%	635,055,528		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1000 laporan	100,279,520	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1000 laporan	100,279,520		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	122,115,400	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	122,115,400		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	412,660,608	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	412,660,608		
	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>		<b>Persentase peningkatan pemahaman ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa</b>	<b>13%</b>	<b>1,821,547,359</b>	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Persentase peningkatan pemahaman ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa</b>	<b>13%</b>	<b>1,821,547,359</b>		

Sp N

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase peningkatan pemahaman ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa	13%	1,821,547,359	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase peningkatan pemahaman ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa	13%	1,821,547,359		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Bangsa, Karakter Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Bangsa, Karakter Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1000 orang	1,821,547,359	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Bangsa, Karakter Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Bangsa, Karakter Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1000 orang	1,821,547,359	Pembinaan Terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>		<b>Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan agama</b>	<b>75%</b>	<b>1,138,933,400</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan agama</b>	<b>75%</b>	<b>1,138,933,400</b>		
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang		Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa	75%	1,138,933,400	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa	75%	1,138,933,400		



No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		yang disebabkan kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan agama			Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	yang disebabkan kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan agama				
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1815 orang	1,138,933,400	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1815 orang	1,138,933,400		
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>		<b>Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan dan Keamanan</b>	<b>75%</b>	<b>9,277,944,758</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan dan Keamanan</b>	<b>75%</b>	<b>9,277,944,758</b>		

Sf  
12

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya	75%	9,277,944,758	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya	75%	9,277,944,758		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2272 orang	9,277,944,758	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2272 orang	9,277,944,758		

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat	60%	61,460,133,890	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat	60%	61,460,133,890		
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan, Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat dan dalam pembangunan	60%	61,460,133,890	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat dan peran serta ormas dalam pembangunan	60%	61,460,133,890		

Sp

A

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Pemerintahan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	(3)	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Pemerintahan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10 orang	61,185,395,440	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Pemerintahan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Pemerintahan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10 orang	61,185,395,440	(11)	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Pemerintahan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan		Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Pemerintahan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	150 orang	274,738,450	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Pemerintahan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Pemerintahan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	150 orang	274,738,450		

Sp

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Situasi Politik di Daerah		Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			Situasi Politik di Daerah	Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>		<b>Persentase peran serta ormas dalam pembangunan</b>	<b>35%</b>	<b>275,808,500</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>Persentase peran serta ormas dalam pembangunan</b>	<b>35%</b>	<b>275,808,500</b>		
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Persentase peran serta ormas dalam pembangunan	47.5%	275,808,500	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase peran serta ormas dalam pembangunan	47.5%	275,808,500		

Sp

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	(3)	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	120 orang	275,808,500	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	120 orang	275,808,500	(11)	

4

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Melalui pelaksanaan forum perangkat daerah diperoleh berbagai usulan terhadap kebutuhan masyarakat terhadap program pembangunan yang akan dijadikan rencana pembangunan kota. Melalui forum ini akan diketahui apa yang menjadi kebutuhan langsung masyarakat. Dari forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah dimaksud ada beberapa masukan/saran usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang (Pokir) untuk dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang. Berikut ini adalah Musrenbang dan Pokir yang akan diakomodir pada Tahun 2024.

Tabel 2.5. (TC – 32 ) Usulan Program dan Kegiatan (Tematik) dan Pokir dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Besaran (Rp.)	Catatan
1	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara	Jl. MGR. Sugio Pranoto No. 23A Kel. Kidul Dalem Kec. Klojen Kota Malang, Kota Malang	Jumlah peserta	5	3,750,000	Musrenbang Kelurahan Kiduldalem
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara	Jl. MGR. Sugio Pranoto No.23A Kel. Kidul Dalem Kec. Klojen Kota Malang, Kota Malang	Jumlah peserta	3	2,250,000	Musrenbang Kelurahan Kiduldalem
3	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan	Pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara	Forum Anak Kelurahan Oro-oro Dowo, Jl. Kunir 9A Malang, Kota Malang	Jumlah peserta	5	3,750,000	Musrenbang Kelurahan Oro-Oro Dowo

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Besaran (Rp.)	Catatan
	Karakter Kebangsaan						
4	PROGRAM Penguatan IDEOLOGI Pancasila DAN KARAKTER KEBANGSAAN/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara	Jl. Sukun Sidodadi RW007 Kelurahan Tanjungrejo, Kota Malang	Jumlah peserta	7	5,250,000	Musrenbang Kelurahan Tanjungrejo
5	PROGRAM Penguatan IDEOLOGI Pancasila DAN KARAKTER KEBANGSAAN/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara	JL PUNTODEWO 29 RT.001 RW.003, Kota Malang	Jumlah peserta	5	3,750,000	Musrenbang Kelurahan Polehan
6	PROGRAM Penguatan IDEOLOGI Pancasila DAN KARAKTER KEBANGSAAN/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara	jl Puntodewo 29 RT.001 RW.003, Kota Malang	Jumlah peserta	4	3,000,000	Musrenbang Kelurahan Polehan
7	PROGRAM Penguatan IDEOLOGI Pancasila DAN KARAKTER KEBANGSAAN/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara	Kelurahan Samaan Jl. Kaliurang Barat No 121, Kota Malang	Jumlah peserta	5	3,750,000	Musrenbang Kelurahan Samaan
8	PROGRAM Penguatan IDEOLOGI Pancasila DAN KARAKTER KEBANGSAAN/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara	Kelurahan Tunjungsekar, Kota Malang	Jumlah peserta	4	3,000,000	Musrenbang Kelurahan Tunjungsekar



No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Besaran (Rp.)	Catatan
9	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara	Jl. Raya Sawojajar No. 45 Kelurahan Sawojajar, Kota Malang	Jumlah peserta	4	3,000,000	Musrenbang Kelurahan Sawojajar
10	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara	Jl bantaran Barat no 2 Kelurahan Tulusrejo, Kota Malang	Jumlah peserta	4	3,000,000	Musrenbang Kelurahan Tulusrejo
11	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara	Jl. Budi Utomo No. 1, Kota Malang	Jumlah peserta	5	3,750,000	Musrenbang Kelurahan Mulyorejo
12	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara	Ter. Cikampek 147 Penanggung, Kota Malang	Jumlah peserta	5	3,750,000	Musrenbang Kelurahan Penanggung
13	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara	Jl. Ki Ageng Gribig No. 12, Kota Malang	Jumlah peserta	4	3,000,000	Musrenbang Kelurahan Kedungkandang

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Besaran (Rp.)	Catatan
14	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara	Jl.S.Supriadi No.15, Kota Malang	Jumlah peserta	5	3,750,000	Musrenbang Kelurahan Kebonsari
15	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara	Karang Taruna Kelurahan Karangbesuki, Kota Malang	Jumlah peserta	5	3,750,000	Musrenbang Kelurahan Karangbesuki
16	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara	Jl. Kol. Sugiono 190, Kel Gadang Kec. Sukun, Kota Malang	Jumlah peserta	5	3,750,000	Musrenbang Kelurahan Gadang
17	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara	Kel. Blimbing, Jl. Tenaga Utara No. 01, Kota Malang	Jumlah peserta	4	3,000,000	Musrenbang Kelurahan Blimbing
18	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara	Jl. Raya Cemorokandang No. 1, Kota Malang	Jumlah peserta	4	3,000,000	Musrenbang Kelurahan Cemorokandang

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Besaran (Rp.)	Catatan
19	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara	Jl. Bandara Narita RW. 11, Kota Malang	Jumlah peserta	4	3,000,000	Musrenbang Kelurahan Cemorokandang
20	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara	Kelurahan Merjosari, Jl. Mertojoyo No. 1, Kota Malang	Jumlah peserta	4	3,000,000	Musrenbang Kelurahan Merjosari
21	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara	Jl. Tembaga no. 3, Kota Malang	Jumlah peserta	4	3,000,000	Musrenbang Kelurahan Purwantoro
22	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara	Jl. Sudimoro 17 Kelurahan Mojolangu, Kota Malang	Jumlah peserta	4	3,000,000	Musrenbang Kelurahan Mojolangu
23	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara	JL MT Haryono XIII/413, Kota Malang	Jumlah peserta	5	3,750,000	Musrenbang Kelurahan Dinoyo

Sp  


No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Besaran (Rp.)	Catatan
24	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara	Jl. Pelabuhan Ketapang 1. Kelurahan Bakalankrajan, Kota Malang	Jumlah peserta	5	3,750,000	Musrenbang Kelurahan Bakalankrajan
25	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara	Gemasaba Jl. Ketapang Nomor 2 RT. 002/ RW. 008 Kel. Kasin, Kec. Klojen, Kota Malang	Jumlah peserta	4	3,000,000	Pokir DPRD
26	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara	Seluruh warga Kota Malang di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang	Jumlah peserta	70	52,500,000	Pokir DPRD
27	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara	Seluruh warga Kota Malang di Kecamatan Klojen, Kota Malang	Jumlah peserta	70	52,500,000	Pokir DPRD
28	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara	Seluruh warga Kota Malang di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang	Jumlah peserta	70	52,500,000	Pokir DPRD

Sfe

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Besaran (Rp.)	Catatan
29	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara	Seluruh warga Kota Malang di Kecamatan Sukun, Kota Malang	Jumlah peserta	70	52,500,000	Pokir DPRD
30	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara	Seluruh warga Kota Malang di Kecamatan Blimbing, Kota Malang	Jumlah peserta	70	52,500,000	Pokir DPRD
31	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara	Jl. Hasyim Asyari Nomor 21, Klojen, Kota Malang	Jumlah peserta	100	75,000,000	Pokir DPRD
32	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara	Kecamatan Lowokwaru	Jumlah peserta	100	75,000,000	Pokir DPRD
33	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara	Kecamatan Lowokwaru	Jumlah peserta	60	45,000,000	Pokir DPRD

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Besaran (Rp.)	Catatan
34	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara	Jl. Kawi 24C, Kota Malang	Jumlah peserta	35	26,250,000	Musrenbang Tematik Pemuda
35	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara	Jl. Ki ageng Gribig No.1 Rt.7 Rw.3, Kota Malang	Jumlah peserta	3	2,250,000	Musrenbang Tematik Pemuda
36	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara	Jl. Ketapang 02, Kota Malang	Jumlah peserta	3	2,250,000	Musrenbang Tematik Pemuda
37	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara	Jl. Soekarno Hatta Kav. 3,5,7, Kota Malang	Jumlah peserta	3	2,250,000	Musrenbang Tematik Pemuda
38	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara	Jl. Hasyim Asy'ari No 21, Kota Malang	Jumlah peserta	15	11,250,000	Musrenbang Tematik Pemuda

Sp  
↑

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Besaran (Rp.)	Catatan
39	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara	Jalan Ciliwung I Blok 54, Kota Malang	Jumlah peserta	15	11,250,000	Musrenbang Tematik Pemuda
40	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara	Jl. Wisnuwardhana Gg. Air Das No.1, Kota Malang	Jumlah peserta	7	5,250,000	Musrenbang Tematik Pemuda
41	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara	Jl. Gajayana No.28 b, Kota Malang	Jumlah peserta	7	5,250,000	Musrenbang Tematik Pemuda
42	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara	Jl. S. Supriadi Gg. XI, Kota Malang	Jumlah peserta	15	11,250,000	Musrenbang Tematik Pemuda
43	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara	Pesona sigura-gura Kav.12, Kota Malang	Jumlah peserta	10	7,500,000	Musrenbang Tematik Pemuda

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Besaran (Rp.)	Catatan
44	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara	Jl. Gajayana 28 B, Kota Malang	Jumlah peserta	3	2,250,000	Musrenbang Tematik Pemuda
45	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara	Jl. Hasyim Asy'ari No 21, Kota Malang	Jumlah peserta	15	11,250,000	Musrenbang Tematik Pemuda
46	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara	Jl. Mayjend Pandjaitan No. 22B, Kota Malang	Jumlah peserta	4	3,000,000	Musrenbang Tematik Pemuda
47	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara	Jl. Sumba No 12, Kota Malang	Jumlah peserta	5	3,750,000	Musrenbang Tematik Pemuda
48	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara	Jl. Anjasmoro No.40, Kota Malang	Jumlah peserta	8	6,000,000	Musrenbang Tematik Pemuda



No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Besaran (Rp.)	Catatan
49	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara	Kel Buring Kec. Kedungkandang, Kota Malang		20	15,000,000	Musrenbang Tematik Perempuan
50	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara	Kel Sukun Kec Sukun, Kota Malang		20	15,000,000	Musrenbang Tematik Perempuan
51	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara	jl. sulfat no 12 kota malang, Kota Malang	Jumlah peserta	25	18,750,000	Musrenbang Tematik Lansia
52	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara	jl. panglima sudirman kota malang, Kota Malang	Jumlah peserta	25	18,750,000	Musrenbang Tematik Lansia
<b>Total</b>					<b>961</b>	<b>720,750,000</b>	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Besaran (Rp.)	Catatan
53	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya/ Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pendidikan tentang bahaya narkoba	Jl. MGR. Sugio Pranoto No. 23A Kelurahan Kidul Dalem Kecamatan Klojen Kota Malang, Kota Malang	Jumlah peserta	4	2,600,000	Musrenbang Kelurahan Kiduldalem
54	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pendidikan tentang bahaya narkoba	TP PKK, Jl. Puncak Buring Indah 1 Kelurahan Buring , Kota Malang	Jumlah peserta	5	3,250,000	Musrenbang Kelurahan Buring
55	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pendidikan tentang bahaya narkoba	Forum Anak Kelurahan Oro-Oro Dowo, Jl. Kunir 9A Malang, Kota Malang	Jumlah peserta	5	3,250,000	Musrenbang Kelurahan Oro-Oro Dowo
56	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pendidikan tentang bahaya narkoba	RT. 1/ RW. 3, Kota Malang	Jumlah peserta	4	2,600,000	Musrenbang Kelurahan Polowijen

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Besaran (Rp.)	Catatan
57	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pendidikan tentang bahaya narkoba	Jl. Teluk Cendrawasih, RT. 05/ RW. 03, Kelurahan Arjosari, Kota Malang	Jumlah peserta	4	2,600,000	Musrenbang Kelurahan Arjosari
58	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pendidikan tentang bahaya narkoba	JL Puntodewo 29 RT. 001/ RW. 003, Kota Malang	Jumlah peserta	3	1,950,000	Musrenbang Kelurahan Polehan
59	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA/Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pendidikan tentang bahaya narkoba	JL Puntodewo 29 RT. 001/ RW. 003, Kota Malang	Jumlah peserta	3	1,950,000	Musrenbang Kelurahan Polehan
60	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pendidikan tentang bahaya narkoba	Kelurahan Samaan Jl. Kaliurang Barat No. 121, Kota Malang	Jumlah peserta	4	2,600,000	Musrenbang Kelurahan Samaan
61	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA/Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pendidikan tentang bahaya narkoba	Kelurahan Balarjosari Kota Malang	Jumlah peserta	3	1,950,000	Musrenbang Kelurahan Balarjosari

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Besaran (Rp.)	Catatan
62	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pendidikan tentang bahaya narkoba	Jl Bantaran Barat II No. 2 Kelurahan Tulusrejo, Kota Malang	Jumlah peserta	5	3,250,000	Musrenbang Kelurahan Tulusrejo
63	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pendidikan tentang bahaya narkoba	Jl. Budi Utomo No. 1, Kota Malang	Jumlah peserta	7	4,550,000	Musrenbang Kelurahan Mulyorejo
64	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pendidikan tentang bahaya narkoba	Kelurahan Penanggung Terusan Cikampek No. 147, Kota Malang	Jumlah peserta	5	3,250,000	Musrenbang Kelurahan Penanggung
65	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pendidikan tentang bahaya narkoba	Jl. Ki Ageng Gribig No. 12, Kota Malang	Jumlah peserta	6	3,900,000	Musrenbang Kelurahan Kedungka ndang
66	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pendidikan tentang bahaya narkoba	Jl. B. Sigura-Gura No. 31, Kota Malang	Jumlah peserta	5	3,250,000	Musrenbang Kelurahan Kedungka ndang

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Besaran (Rp.)	Catatan
67	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pendidikan tentang bahaya narkoba	Kelurahan Blimbing, Jl. Tenaga Utara No. 01, Kota Malang	Jumlah peserta	4	2,600,000	Musrenbang Kelurahan Blimbing
68	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pendidikan tentang bahaya narkoba	Jl. Raya Cemorokandang No. 1, Kota Malang	Jumlah peserta	5	3,250,000	Musrenbang Kelurahan Cemorokandang
69	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pendidikan tentang bahaya narkoba	Jl. Bandara Narita RW. 11, Kota Malang	Jumlah peserta	5	3,250,000	Musrenbang Kelurahan Cemorokandang
70	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pendidikan tentang bahaya narkoba	Gedung Pertemuan Kantor Kelurahan Kotalama, Jl. Kebalen Wetan No.5, Kota Malang	Jumlah peserta	6	3,900,000	Musrenbang Kelurahan Kotalama
71	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pendidikan tentang bahaya narkoba	Jl. Tembaga No. 3, Kota Malang	Jumlah peserta	3	1,950,000	Musrenbang Kelurahan Purwantoro

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Besaran (Rp.)	Catatan
72	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pendidikan tentang bahaya narkoba	Jl. Sudimoro 17 Kelurahan Mojolangu, Kota Malang	Jumlah peserta	5	3,250,000	Musrenbang Kelurahan Mojolangu
73	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pendidikan tentang bahaya narkoba	JL M. T. Haryono XIII/ 413, Kota Malang	Jumlah peserta	5	3,250,000	Musrenbang Kelurahan Dinoyo
74	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pendidikan tentang bahaya narkoba	Kecamatan Lowokwaru	Jumlah peserta	75	48,750,000	Pokir DPRD
75	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pendidikan tentang bahaya narkoba	Jl. Kawi 24C, Kota Malang	Jumlah peserta	14	9,100,000	Musrenbang Tematik Pemuda
76	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pendidikan tentang bahaya narkoba	Jl. Gajayana No. 28B, Kota Malang	Jumlah peserta	5	3,250,000	Musrenbang Tematik Pemuda

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Besaran (Rp.)	Catatan
77	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pendidikan tentang bahaya narkoba	Jl. Sumba No. 12, Kota Malang	Jumlah peserta	3	1,950,000	Musrenbang Tematik Pemuda
78	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pendidikan tentang bahaya narkoba	Jl. Gajayana 28B, Kota Malang	Jumlah peserta	3	1,950,000	Musrenbang Tematik Pemuda
79	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pendidikan tentang bahaya narkoba	Jl. Mayjend Pandjaitan No. 22B, Kota Malang	Jumlah peserta	3	1,950,000	Musrenbang Tematik Pemuda
80	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pendidikan tentang bahaya narkoba	Jl. Sumba No 12, Kota Malang	Jumlah peserta	7	4,550,000	Musrenbang Tematik Pemuda
81	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pendidikan tentang bahaya narkoba	Jl. Anjasmoro No. 40, Kota Malang	Jumlah peserta	5	3,250,000	Musrenbang Tematik Pemuda

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Besaran (Rp.)	Catatan
82	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pendidikan tentang bahaya narkoba	Jl. Semarang, Kota Malang	Jumlah peserta	21	13,650,000	Musrenbang Tematik Perempuan
<b>Total</b>					<b>232</b>	<b>150,800,000</b>	
						<b>871,550,000</b>	

SP



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Prioritas Nasional Bakesbangpol pada Tahun 2023 yaitu :

a) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Untuk mencapai prioritas tersebut diwujudkan melalui Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan; Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya; Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik; dan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Hal ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi yang bertujuan untuk menanamkan dan menumbuh kembangkan nilai-nilai Pancasila pada aparat dan seluruh masyarakat serta memfasilitasi silahurrakmi dan komunikasi antar suku, etnis dan golongan serta pendidikan dan latihan tentang bela negara, memfasilitasi pengembangan pendidikan politik bagi masyarakat dan mengaktifkan seluruh komponen masyarakat untuk berperan dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

b) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Untuk mencapai prioritas tersebut diwujudkan melalui Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial. Hal ini dilakukan dengan cara membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan membentuk Tim Terpadu.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang 2024-2026. Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah selama tiga

tahun dan dijadikan acuan dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang Tahun 2024.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai (target) pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan dan Sasaran.

Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang adalah :  
“Terwujudnya Kondusivitas Lingkungan Sosial”

- Indikator : Persentase penyelesaian kejadian gangguan ketertiban /konflik sosial.

Sasaran yang hendak dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tujuan tersebut yakni :

i. Meningkatnya Penyelesaian Gangguan Disintegrasi Bangsa

Indikator :

- Persentase Penyelesaian Kejadian Gangguan Disintegrasi Bangsa

ii. Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pembangunan

Indikator :

- Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat dan peran serta ormas dalam pembangunan

iii. Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah

Indikator :

- Nilai SAKIP

2. *Crosscutting* isu strategis.

Pada isu strategis daerah “kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat”, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang mendukung dalam upaya sbb :

i. Meningkatnya penyelesaian gangguan disitengrasi bangsa melalui :

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

Sp  
↑

Aktivitas yang akan dilakukan adalah melaksanakan kegiatan Pembinaan Terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka dan melaksanakan pendidikan wawasan kebangsaan kepada masyarakat berupa kegiatan sosialisasi.

- b. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

Aktivitas yang akan dilakukan adalah melaksanakan sosialisasi P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) kepada masyarakat dan menyusun Ranperwal Fasilitasi P4GN.

- c. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

Aktivitas yang akan dilakukan adalah Membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) mulai dari Tingkat Kecamatan sampai dengan Kota dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, serta melaksanakan Sosialisasi Kewaspadaan Nasional.

- ii. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan, melalui program

- a. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,

Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

Aktivitas yang akan dilakukan adalah mengkomodir penyampaian belanja hibah untuk KPU, BAWASLU dan Partai Politik Pemenang Pemilu.

Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

Aktivitas yang akan dilakukan melaksanakan kegiatan Pendidikan politik kepada masyarakat berupa sosialisasi.

- b. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

Aktivitas yang akan dilakukan adalah Sosialisasi kepada masyarakat tentang keormasan dan Jambore Ormas.

### 3.3. Program dan kegiatan

Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Untuk melaksanakan kegiatan yang direncanakan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang harus selalu mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut diatas, yaitu :

- a. Penyelesaian Gangguan Disintegrasi Bangsa, dapat dihitung melalui tercapainya Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter

Kebangsaan, Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya, dan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

- b. Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pembangunan, dapat tercapai melalui Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dan Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
- c. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan, dan sub kegiatan antara lain meliputi :  
Jumlah program yaitu 6 program, jumlah kegiatan yaitu 12 kegiatan, dan jumlah sub kegiatan yaitu 34 sub kegiatan dengan total kebutuhan dana/pagu indikatif Rp. 80.904.716.740.
- d. Rumusan program dan kegiatan sudah sesuai dengan rancangan RKPD, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.1. (TC – 33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Malang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENCANA STRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8		UNSEUR PEMERINTAHAN UMUM						80.904.716.740,00							19.001.389.570,00	
8.01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						80.904.716.740,00							19.001.389.570,00	
1.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase peningkatan pemahaman Ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa	13 %			13 %	73.974.367.907,00							12.490.274.204,00	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan, Tevis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase peningkatan pemahaman ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa	-			13 %	1.821.547.359,00							1.821.547.359,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.0004		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejaran Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejaran Kebangsaan	1000 Orang			1000 Orang	1.821.547.359,00	Kota Malang, Kecamatan, Semua Ke/Desa						1.821.547.359,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN CEREBAS MELALUI PENINGKATAN POLTIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat	60 %			60 %	61.460.133.690,00							6.829.558.450,00	

Sp 1

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELompok Sasaran		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
1	8.01.03.2.01	Penyusunan Kebijakan dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Pengembangan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat dan peran serta ormas dalam pembangunan	-	6	7	60 %	51.460.133.890,00	10	11	12	13	14	15	16	17	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Pengembangan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Pengembangan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10 Orang			61.185.305.440,00	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						6.554.820.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Pengembangan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Pengembangan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	150 Orang			274.738.450,00	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	REKONSTRUKSI ASLI DAERAH (PAD)						274.738.450,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase peran serta ormas dalam pembangunan	35 %			35 %	275.808.500,00						35 %	275.808.500,00	
	8.01.04.2.01	Penunasan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase peran serta ormas dalam pembangunan	-			47,50 %	275.808.500,00					Terlaksananya kebijakan teknis dan pemantauan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	-	275.808.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	Peaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pembudayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pembudayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	120 Orang			120 Orang	275.808.500,00	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Terlaksananya kebijakan teknis dan pemantauan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan		275.808.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan kondisi Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	75 %			75 %	1.138.933.400,00						75 %	1.289.001.896,00	

SP



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	8.01.05.2.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Perserikatan penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan agama	-		7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.05.2.01.0004	Peleksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penyalngan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penyalngan Penyalngan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	75 %			750 Orang	1.138.933.400,00	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PP4 - Peningkatan Kepekaan Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal Mendorong revolusi mental dan pembangunan budaya masyarakat	14	15	16	17	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perserikatan penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan konflik ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keamanan	75 %			75 %	9.277.944.756,00				PP4 - Peningkatan Kepekaan Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal Mendorong revolusi mental dan pembangunan budaya masyarakat		75 %	2.294.358.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Perserikatan penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya	-			75 %	9.277.944.756,00				PP7 - Peningkatan Keterampilan Umum dan Perilaku bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah		-	2.294.358.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Peleksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri / Kerja Sama Irteljen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah															

Sp /

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kevaspasdaan Dtl, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kevaspasdaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kevaspasdaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	2272 Orang			2272 Orang	9.277.944.758,00	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP7 - Peningkatan Kegiatan Kelembagaan Kemasyarakatan, Ketertarikan Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Terlaksananya kebijakan teknis dan pemantauan kevaspasdaan nasional dan penanganan konflik sosial	15	2.294.358.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						6.530.348.833,00							6.511.095.386,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu Persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 % 100 %			100 % 100 % 100 % 100 %	6.530.348.833,00						100 % 100 % 100 % 100 %	6.511.095.386,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
1	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persertase dokumen perencanaan, keuangan, dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai kebutuhan	-	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
				100 %			143.256.300,00								143.256.300,00			
	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen			44.661.100,00	Kota, Malang, Semu Kecamatan Semu KelDesa		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					44.661.100,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																

Sep 1

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD				15 Laporan	98.595.200,00	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kad/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PP7 - Peningkatan Kelembagaan Kelembagaan, Ketertarikan Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur			98.595.200,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkoat Daerah	Pencertase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	-			100 %	4.658.757.300,00				PP7 - Peningkatan Kelembagaan, Ketertarikan Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur			4.239.503.833,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

Sp

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gai dan Tunjangan ASV	28 Orang/bulan	4.658.757.300,00	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PP7 - Peningkatan Kegiatan Kelestarian, Ketertarikan Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur						4.239.503.833,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X.XX 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	100 %	4.862.029,00										4.862.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X.XX 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

Sp2

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	6	7	10 Laporan	4.862.023,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12	13	14	15	16	17	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum, Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	100 %				886.698.204,00							886.698.204,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															

SP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL		DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.06.0000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	104 Dokumen			104 Dokumen	37.400.000,00	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PP7 - Peningkatan Kegiatan Kelestarian, Ketertarikan Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	14	15	37.400.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	152 Laporan			152 Laporan	849.298.234,00	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PP7 - Peningkatan Kegiatan Kelestarian, Ketertarikan Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	-		849.298.234,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SP A

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL		DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
1	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintah Daerah	Pecertase pengadaan barang milik daerah sesuai RKEMD	-	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				100 %	172.112.922,00			172.112.922,00				PP7 - Peningkatan Kelembagaan, Kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Jawa Timur			92.356.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit				172.112.922,00	Semua Kab/Kab, Kota, Kecamatan, Semua KertDesa Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua KertDesa	FENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PP7 - Peningkatan Kelembagaan, Kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Jawa Timur			92.356.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sq



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL		DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemungutan Urusan Pemerintahan Daerah	4 Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
							100 %	635.065.528,00							680.427.440,00		
	X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1000 Laporan	100.279.520,00	Kota Malang, Semu Kecamatan, Semu KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					100.279.520,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	122.115.400,00	Kota Malang, Semu Kecamatan, Semu KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					122.115.400,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sp A

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.08.0004		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dihasilkan				1 Laporan	412.860.608,00		Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					498.032.529,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemertahanan Daerah	Persentase barang milk daerah yang terpelihara				100 %	429.800.550,00								463.991.560,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pelembagaan Dinas Operasional atau Lapangan															

Sp

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDAMAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperkhara dari Sibarakan Pajalek dan Perizainnya	5	6	7	8 13 Unit	9 379.455.550,00	10 Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	11 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12	13	14	15 16	17 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	X.XX.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diperkhara	19 Unit			50.150.000,00	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					84.535.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
<b>J U M L A H</b>								<b>80.904.718.740,00</b>						<b>19.001.389.570,00</b>		

SP 1

TABEL 4.2 PEMETAAN SUB KEGIATAN SESUAI KEPMEN 900.15.5-1317 TAHUN 2023

No.	Lama						Baru (Sesuai KEPMEN 900.15.5-1317 Tahun 2023)				
	Kode	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Kode	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1	8.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra	1	dokumen	X.XX.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	dokumen	
2	8.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	15	dokumen	X.XX.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	laporan	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
3	8.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	28	pegawai	X.XX.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28	orang/bulan	
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah					Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah				

No.	Lama					Baru (Sesuai KEPMEN 900.15.5-1317 Tahun 2023)				
	Kode	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Kode	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		pada Perangkat Daerah					pada Perangkat Daerah			
4	8.01.01.2.03.06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah	10	dokumen	X.XX.01.2.03.0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10	laporan
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
5	8.01.01.2.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor	12	jenis	X.XX.01.2.07.0010	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12	unit
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
6	8.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	13	unit	X.XX.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13	unit
7	8.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	19	jenis	X.XX.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19	unit
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			

Sp

No.	Lama				Baru (Sesuai KEPMEN 900.15.5-1317 Tahun 2023)					
	Kode (2)	Sub Kegiatan (3)	Indikator (4)	Target (5)	Satuan (6)	Kode (7)	Sub Kegiatan (8)	Indikator (9)	Target (10)	Satuan (11)
8	8.01.01.2.06.06	Sub Kegiatan Bahan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	104	eksemplar	X.XX.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	104	dokumen
9	8.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	152	OH	X.XX.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	152	laporan
10	8.01.01.2.08.01	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
11	8.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik	12	bulan	X.XX.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan
12	8.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	2050	m <sup>2</sup>	X.XX.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	laporan

No.	Lama					Baru (Sesuai KEPMEN 900.15.5-1317 Tahun 2023)				
	Kode	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Kode	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			
		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			
13	8.01.02.2.01.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta pertemuan	900	orang	8.01.02.2.01.0004	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1000	orang
		PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya					PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya			
		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya					Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			

SP

No.	Lama					Baru (Sesuai KEPMEN 900.15.5-1317 Tahun 2023)				
	Kode (2)	Sub Kegiatan (3)	Indikator (4)	Target (5)	Satuan (6)	Kode (7)	Sub Kegiatan (8)	Indikator (9)	Target (10)	Satuan (11)
14	8.01.05.2.01.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah dokumen	1	dokumen	8.01.05.2.01.0004	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	750	orang
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial					Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			

Spc A



		Lama					Baru (Sesuai KEPMEN 900.15.5-1317 Tahun 2023)				
No.	Kode	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Kode	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	
15	8.01.06.2.01.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-Jumlah personil pemantau, personil Wasdin, personil FKDM, personil Tim Terpadu Konflik Sosial, personil Forkopimda - Jumlah peserta rakor, sosialisasi, pembekalan, FGD	1617 , 655	(6) orang, orang	8.01.06.2.01.0004	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2272	(11) orang	
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				

Sp A

Baru (Sesuai KEPMEN 900.15.5-1317 Tahun 2023)										
No.	Lama					Baru (Sesuai KEPMEN 900.15.5-1317 Tahun 2023)				
	Kode	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Kode	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik					Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			
16	8.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah parpol penerima hibah	10	parpol	8.01.03.2.01.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10	orang

Sp 1

No.	Lama					Baru (Sesuai KEPMEN 900.15.5-1317 Tahun 2023)				
	Kode	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Kode	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
17	8.01.03.2.01.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah pelaku sosialisasi	150	orang	8.01.03.2.01.0004	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	150	orang
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>					<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>			
		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat					Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat			

No.	Lama					Baru (Sesuai KEPMEN 900.15.5-1317 Tahun 2023)				
	Kode	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Kode	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
18	8.01.04.2.01.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah ormas yang terdata	120	ormas	8.01.04.2.01.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah	120	(11) orang

8/1

BAB V  
PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama tahun 2024.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang ini meliputi rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Rencana program ini pengembangannya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat khususnya bidang politik dan keamanan di Kota Malang. Dengan demikian, rencana program ini memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis, sepanjang proses pembangunan dilaksanakan secara efisien, tepat sasaran dan berdaya guna, serta sesuai dengan misi yang telah ditetapkan.

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian yaitu program dan kegiatan beserta indikasi anggaran yang telah ditetapkan merupakan acuan, dan apabila terdapat perubahan tidak berimplikasi dalam mewujudkan sasaran
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan yaitu:
  1. Renja ini merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan Bakesbangpol
  2. Bakesbangpol berkewajiban menjamin konsistensi antara Renja Perangkat Daerah dengan Renstra
  3. Keberhasilan pelaksanaan Renja Bakesbangpol sangat tergantung dari peran seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya
- c. Rencana tindak lanjut  
Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Renja Bakesbangpol Tahun 2024, Bakesbangpol berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan/implementasi dokumen Renja Bakesbangpol Tahun 2024.

WALIKOTA MALANG,

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19681112 199102 1 002

ttd.  
SUTIAJI